KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		· <u>-</u> <u>-</u>					
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5			н.4 Х	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 4 9 9 2 7 6 2 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARYATI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	8.945.000	8.945.000	0	5	447.250	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Org	ganisasi :						
C.4 Tanggal :		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
C.5 Nama Penandatangan :		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	y berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

1AAOOWYO